2025
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN





dpmptsp
Kabupaten Nunukan

0811-5428-883
dpmptspkabnunukan
Komplek kantor bupati
Jl Sei, jepun-Mansapa

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025 merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan bagi seluruh ASN di DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dimulai tahun 2016 operasionalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai wujud komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan untuk menciptakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, cepat, tepat dan transparan terhadap calon investor yang akan terus dibangun dan dikembangkan.

RENJA Tahun 2025 ini memuat rencan Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan, lengkap dengan target kinerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Demikian RENJA ini dibuat, sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nunukan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Nunukan, 31 Agustus 2024
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU . **9**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM dan KEGIATAN **25**
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencna Kerja SKPD 27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **33**
BAB V PENUTUP **44**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. TC 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategi Tahun 2023 11
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja Pelayanan PD 17
Tabel 2.3. TC.31 Review terhadap Ranwal RKPD 20
Tabel 3.1. Kebijakan Nasional dan Provinsi 25
Tabel 3.2. TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 29
Tabel 4.1. Rencana Kerja OPD Tahun 2025 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 13 ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan memuat gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun serta menjawab apa yang menjadi tujuan, sasaran, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Adapun tahapan dalam penyusunan RENJA sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 pada Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan periode tahun anggaran 2025 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 yang mengacu

pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan (RKPD) dan merupakan operasionalisasi dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Nunukan mempunyai 6 Rencana Program Pelaksanaan Perangkat Daerah yang terdiri dari 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025

1.2. Landasan Hukum

Dasar yang menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 53620;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6618);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
31. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025, sebagai berikut :

1. mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025;
2. menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan tahun 2026;

3. menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan tahun 2025;
4. menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025 menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sub bab ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENJA Perangkat Daerah, serta penjelasan umum muatan setiap bab.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan tentang hasil evaluasi Renja perangkat daerah serta capaian sasaran perangkat daerah pada tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai

target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan implementasinya

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Agar mudah mengidentifikasikan tahun mana yang dimaksud dengan tahun lalu tahun berjalan, atau tiga tahun sebelum rencana, berikut ini diuraikan ilustrasi menggunakan angka tahun n.

Misalnya untuk Penyusunan Renja DPMPTSP Tahun 2025, maka :

Tahun n = Tahun yang direncanakan,yaitu tahun 2025

Tahun n-1 = Tahun berjalan,yaitu tahun 2024

Tahun n-2 = Tahun lalu,yaitu tahun 2023

Tahun n-3 = Dua tahun lalu, yaitu tahun 2022

Dari ilustrasi diatas maka review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu yang dimaksud adalah review terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada RENJA Tahun Anggaran 2023 (n-2), sedangkan perkiraan capaian tahun berjalan adalah perkiraan capaian kinerja pada tahun 2024 (n-1).

Review hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang akan direview terhadap RENJA Tahun 2024 antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ;
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA SKPD;dan

f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berikut akan disajikan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan dan Pencapaian RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Nunukan sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 2.1 TC.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/Output)/Kegiatan (Outcome/output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA PD)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d th (n-1)	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD th (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th berjalan	
										Target Renja PD Th (n-2)	Realisasi Renja PD Th (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Prog / Keg s/d Th berjalan (th n-1)	Tingkat Capaian Prog / Keg s/d Th berjalan (th n-1)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7-9)	11 = (10/4)	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan tata kelola Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**	**90.42**	**100**	**100**	100	**100**	100	1	
2	**18**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun**	**6**	**Dok**	**6**	**6**	**6**	**100**	**6**	**6.00**	**1.00**	**1**
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	2	2	2	100	2	2.00	1	1
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	laporan	4	4	4	100	4	4.00	1	1
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit kerja Instansi yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**4**	**Unit**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1.00**	**1**	**1**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	bln/orng	14	14	14	100%	14	14.00	1	1.00
2	**18**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi pengelolaan BMD**	**1**	**Unit**	**1**	**1**	**1**	**100%**	**1**	**1.00**	**1.00**	**1**
2	18	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah capaian rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1	unit	0	0	0	0	0	-	-	-
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**1**	**Unit**	**1**	**1**	**1**	**100.%**	**1**	**1.00**	**1**	**1**

2	18	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	laporan	12	12	12	100.%	12	12.00	1	1
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	12	12	12	100.%	12	12.00	1	1
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD**	**1**	**Unit**	**1**	**1**	**1**	**100.%**	**1**	**1.00**	**1**	**1**
2	18	01	2.09	02	Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	unit	9	9	9	100.%	9	9.00	1.00	1
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	unit	1	1	1	100.%	1	1	1	1
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Unit kerja Internal yang mendapatakn layanan Adminstrasi umum**	**1**	**Unit**	**1**	**1**	**1**	100.%	**1**	1.00	1.00	1
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	paket	1	1	1	100.%	1	1.00	1.00	1
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	paket	1	1	1	100.%	1	1.00	1.00	1
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1	paket	1	1	1	100.%	1	1.00	1.00	1
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25	laporan	25	25	25	100.%	25	25.00	1.00	1
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Penilaian Kinerja PTSP**	**Sangat Baik**	**Indeks**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penerbitan izin usaha dan Non usaha**	**200**	**Jumlah Izin**	**310**	**250**	**250**	**100.%**	**200**	**360.00**	**1.16**	**1**
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	200	pelaku usaha	200	200	200	100.%	200	**200.00**	**1.00**	**1**

2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	50	orang	50	50	50	100.%	50	**50.00**	**1.00**	**1**
	18	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal dan Pelaku Usaha**	**30**	**Pesren**	**20%**	**18%**	**25%**	**138.89%**	**25%**	**20%**	400%	
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aturan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Penanamam Modal**	**2**	**Dok**	**2**	**2**	**2**	**100.%**	**2**	**2.00**	**1**	**1**
2	18	12	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1	Dok	1	1	1	100.%	1	2.00	**2.00**	**2**
2	18	12	2.02	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1	keg	1	1	1	100.%	1	1.00	**1.00**	**1**
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**1**	**Dok**	**1**	**1**	**1**	**100.%**	**1**	**1.00**	**1.00**	**s**
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	dok	1	1	1	100.%	1	1.00	1.00	**1**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/ Kota	2	dok	2	2	2	100.%	2	2.00	1.00	**1**
	18	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional**	**30**	**Investor**	**26**	**24**	**24**	**100.%**	**24**	**26.00**	**1.30**	
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang di ikuti**	**1**	**Jumlah**	**1**	**1**	**1**	**100.%**	**1**	**1.00**	**1**	**1**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/ Kota	2	dok	2	2	2	100.%	2	2.00	1	1
	18	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Tingkat Kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan Perizinan Berusaha**	**Sangat Baik**	**Nilai**	**Baik**	**Baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	**sangat baik**	

2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal**	**14**	**Jumlah**	**14**	**14**	**14**	**100**	**14**	**14**	**0**	**0**
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2	Pelaku usaha	2	2	2	100.	2	2.00	1	1
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi	6	Keg. usaha	6	6	6	100.%	6	6.00	1	1
	18	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal,pelaku usaha yang dapat diolah,di kaji dan dimanfaatkan**	**100**	**Persen**	**100%**	**80%**	**100%**	**125.%**	**100%**	**100%**	**0.01**	
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemanfaatan Pelayanan Berbasis Online**	**70**	**Jumlah**	**65**	**60**	**73.00**	**121.67%**	**10**	**132.00**	**2.64**	**3**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfataan Data dan Informasi Perizinan Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	70	Jumlah	65	60	73	121.67%	74	137	2	2

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Pemerintah dalam Peningkatan Daya Saing Investasi secara Nasional yang Implementasinya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kebijakan nasional lainnya yang mendukung peningkatan realisasi investasi secara nasional.

DPMPTSP Kabupaten Nunukan akan mendorong upaya kerja sama Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, pelaku usaha lokal dengan Pengusaha Regional, Nasional, dan Internasional dalam upaya meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Perbaikan Realisasi Investasi, Iklim Investasi dan pengembangan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, DPMPTSP Kabupaten Nunukan mempunyai tugas pokok melaksanakan Koordinasi Kebijakan Daerah dan Pelayanan di bidang Penanaman Modal serta Perizinan Usaha dan Perizinan Non Usaha secara terpadu dengan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, DPMPTSP Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Daerah di bidang pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan Penyelenggaraan PTSP;
2. Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dan penyelenggaraan PTSP;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, dan penyelenggaraan PTSP;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator adalah:

1. Peningkatan layanan dan sarana dan prasarana Mal Pelayanan Publik;
2. Pencapaian Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Pelaksanaan Perencanaan, Promosi, Kerja sama dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
4. Pelaksanaan Perizinan Usaha melalui Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi serta Monitoring baik tenaga kerja lokal dan utamanya bagi para tenaga kerja asing
5. Memberikan kemudahan Pelayanan Perizinan melalui kegiatan Mobile Service,Jemput Bola dan One Day Service;
6. Melakukan Inovasi dan Kerja sama Investasi melalui Nunukan Investment Forum di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
7. Memberikan kemudahan perizinan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Nunukan
8. Memberikan Reward bagi para pengusaha yang taat memasukkan Laporan Kemajuan Penanaman Modalnya (LKPM);
9. Memberikan Reward dan Punishment bagi ASN yang berprestasi
10. Peningkatan Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala yaitu setiap Per triwulan.
12. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pengembangan Data Base berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

(TIK).

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bidang Penanaman Modal dan Bidang Perizinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan

No	Indikator Kinerja	Target Renstra PD				RealisasiCapaian			Proyeksi	Catatan Analisis
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (Milyar Rupiah)	1.249	1.311	1.377	1.514	1.850	4.619	2.499 On Progres s/d (TW 2)	1.514	Upaya yang dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan menjamin terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahandalam pelaksanaan penanaman modal melalui koordinasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta perusahaan penanaman modal melalui kerjasama antar kab/kota dan *stakeholders* terkait
No	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target Renstra PD**				**RealisasiCapaian**			**Proyeksi**	**Catatan Analisis**
		2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	
1.1	Nilai Pertumbuhan Rencana Investasi Penanaman Modal	8%	10%	15%	18%	70.50 %	262,58%	5,70% On Progres s/d (TW 2)	18%	Untuk dapat mengurangi kendala yang dihadapi saat ini DPMPTSP terus melakukan rangkaian kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis baik terkait peraturan pemberian fasilitas insentif daerah, dasar hukum maupun tentang tata cara pelaporan kegiatan penanaman modal secara berkelanjutan yang melibatkan aparatur teknis terkait, pemerintah Kabupaten/Kota serta perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kabupaten Nunukan.
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ataspelayanan perizinan	95	95	95	95	90,67	95,31	92,35 On Progres s/d (TW 2)	95	Sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja penerapan peraturan perizinan berusaha dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko melalui OSS-RBA dan peringkat skala usaha kegiatan usaha di mana pengetahuan terkait dengan OSS-RBA oleh pengusaha di daerah serta OPD Teknis masih sangat terbatas. Selain itu, saat ini sistem OSS RBA antara Kementerian dan lembaga belum terintegrasi dengan baik.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Nunukan lima tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan visi tahun 2021-2026 yakni ***Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Aman, Maju, Adil dan Sejahtera.*** Dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam memberi manfaat bagi masyarakat umum, dunia usaha dan juga bagi Pemerintah sendiri. Bagi masyarakat, dengan adanya DPMPTSP, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik, serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum formal yang dimiliki. Bagi dunia usaha, DPMPTSP diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam perizinan usaha yang akan meningkatkan minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha.

Selain itu, dunia usaha juga diharapkan memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi pelayanan yang menghasilkan pengurangan waktu dan biaya membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan biaya pada kegiatan-kegiatan produktif bagi pemerintah.

Permasalahan dan faktor Pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi antara lain:

1. Mengurangi beban administratif karena pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di Perangkat Daerah lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan nonperizinan yang diperlukannya;

2. Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak;
3. Terbangunnya citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan;
4. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan Perizinan dan Non perizinan

Dalam Upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, Aparatur DPMPTSP harus berkompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebaskan dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Selain itu proses review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini juga dilakukan dalam rangka merasionalisasi kembali pendanaan indikatif program/ kegiatan karena kebijakan keuangan daerah akibat defisit anggaran dan krisis nasional yang melanda Indonesia. Mudah-mudahan ditahun 2025 program/ kegiatan dalam pendanaan dapat terealisasi dalam usulan rencana kerja tahun 2025.

Berikut disajikan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD DPMPTSP Kabupaten Nunukan tahun 2025 (TC.31):

Tabel 2.3 TC.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan tata kelola Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan pelaksanaan tata kelola Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**		**Kegiatan rutin PD**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun**	**6 dok**	**12.910.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab . Nunukan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun**	**6 dok**		**Kegiatan rutin PD**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kab. Nunukan**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok		Kegiatan rutin PD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok	**2.910.000**	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dok		Kegiatan rutin PD
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit kerja Instansi yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**1 Unit**	3.368.000.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit kerja Instansi yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**1 Unit**		Kegiatan rutin PD
1.2.1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	25 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**25 Laporan**		Kegiatan rutin PD

1.3	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**12 Bulan**	**450.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**12 Bulan**		**Kegiatan rutin PD**
1.4	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi pengelolaan BMD**	**1 Unit**	**2.400.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Kab. Nunukan	**Jumlah Unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi pengelolaan BMD**	**1 Unit**		**Kegiatan rutin PD**
1.4.1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dok	2.400.000	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang milik daerah SKPD	Kab. Nunukan	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen		Kegiatan rutin PD
1.5	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit kerja Internal yang mendapatkan layanan**	**1 Unit**	**110.000.000**	**Administrasi Umum PerangkatDaerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit kerja Internal yang mendapatkan layanan**	**1 Unit**		**Kegiatan rutin PD**
1.5.1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket		Kegiatan rutin PD
1.5.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Paket Peralatan logistik kantor yang disediakan	1 paket	50.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Paket Peralatan logistik kantor yang disediakan	12 paket		Kegiatan rutin PD
1.5.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nunukan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orng/bln	3.368.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nunukan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orng/bln		Kegiatan rutin PD
1.5.4	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab. Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	81.346.272	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kab. Nunukan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan		Kegiatan rutin PD
1.5.5	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 laporan	368.653.728	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Kab. Nunukan	Persentase tersedianyajasa penunjang urusanpemerintah	12 laporan		Kegiatan rutin PD
1.6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BM**	**9 Unit**	**20.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pemeliharaan BMD**	**9 Unit**		**Kegiatan rutin PD**
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau jabatan	Kab. Nunukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	9 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau jabatan	Kab. Nunukan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	9 Unit		Kegiatan rutin PD
1.6.2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kab. Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		Kegiatan rutin PD

2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal dan Pelaku Usaha**	**Persen**	**56.610.000**	**Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal dan Pelaku Usaha**	**Kab. Nunukan**	**Persentase Peningkatan Jumlah Penanaman Modal dan Pelaku Usaha**	**Persen**		**Penyusunan Perda Insentif Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi**
2.1	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Aturan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal**	**2 Dok**	**18.610.000**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Aturan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas dan Kemudahan Penanaman Modal**	**2 Dok**		**Penyusunan Perda Insentif Penanaman Modal dan Peta Potensi Investasi**
2.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	2 Dok		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal			
2.1.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Nunukan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 kegiatan		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Kab. Nunukan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 kegiatan		Penyusunan Perda Insentif Penanaman Modal
2.2	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**1 dok**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**	**1 dokumen**		
2.2.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 dok		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 dokumen		
2.2.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/ Kota	1 dok		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha kabupaten/ Kota	1 dokumen		
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional**	**20 Investor**		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penanaman Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional**	**20 Investor**		
3.1	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang di ikuti**	**1 Jumlah**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang di ikuti**	**1 Jumlah**		

3.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dok		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal kewenangan Kabupaten/ Kota	2 Dokumen		
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Penilaian Kinerja PTSP**	**Index**	**Baik**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Penilaian Kinerja PTSP**	**Index**	**Sangat baik**	
4.1	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penerbitan izin usaha dan Non usaha**	**310 Jumlah Izin**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Penerbitan izin usaha dan Non usaha**	**310 Jumlah Izin**		
4.1.1	Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Nunukan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	200 jumlah izin		Penyediaan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Nunukan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	200 Jumlah Izin		
4.1.2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Nunukan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (pelaku Usaha)	50 Jumlah izin		Penyediaan Layanan Konsultasi dan pengelolaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Kab. Nunukan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (pelaku Usaha)	50 Jumlah izin		
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Tingkat Kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan Perizinan Berusaha**	**Nilai**	**Baik**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Tingkat Kepatuhan Penanaman Modal terhadap ketentuan Perizinan Berusaha**	**Nilai**	**Sangat baik**	
5.1	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal**	**14 Jumlah**	**541.308.000**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal**	**14 Jumlah**	**541.308.000**	
5.1.1	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab. Nunukan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	280 Pelaku usaha	297.092.000	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Kab. Nunukan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	279 Pelaku usaha	297.092.000	

5.2	Pengawasan penanaman modal	Kab. Nunukan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku. Dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	18 kegiatan Usaha	170.216.000	Pengawasan penanaman modal	Kab. Nunukan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah di analisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku. Dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	18 kegiatan Usaha	170.216.000	
5.3	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Nunukan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 kegiatan usaha	74.000.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab. Nunukan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	9 kegiatan usaha	74.000.000	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMSI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal,pelaku usaha yang dapat diolah,di kaji dan dimanfaatkan**	**100 %**		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMSI PENANAMAN MODAL**	**Kab. Nunukan**	**Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal,pelaku usaha yang dapat diolah,di kaji dan dimanfaatkan**	**100%**		
6.1	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Nunukan**	**Jumlah Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**73 Dok**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Kab . Nunukan**	**Jumlah Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**73 Dok**		
6.1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Nunukan,	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	73 Dok		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Kab. Nunukan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	73 Dok		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam penyusunan rencana kerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tentu tidak terlepas dari prioritas Kebijakan Nasional dan arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil telaahaan terhadap kebijakan tersebut disajikan pada tabel berikut sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Nunukan.

Tabel 3.1

Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi Kalimantan Utara

NO	KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI	SUMBER	KETERANGAN
1	Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2025.	RENSTRA Tahun 2021-2026	Permasalahan pelayanan DPMPTSP yang dihadapi sehubungan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi adalah sebagai berikut : 1. DPMPTSP belum memiliki gedung/bangunan yang tetap. 2. Mengurangi beban administratif karena Pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Berbagai data menyangkut aktivitas masyarakat diwilayah tersebut dapat dipadukan dalam satu kumpulan data (data base), sehingga mengurangi beban pendataan di PD lain, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan pendataan yang tidak perlu. Secara tidak langsung kemudahan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) karena masyarakat akan semakin percaya dengan Pelayanan Publik Pemerintah dan akan bersedia mengurus izin dan non perizinan yang diperlukannya.
2	Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2025, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).		
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2025.		
4	Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2025 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.		

			3. Meningkatkan daya saing dan kemandirian Daerah. Dengan semakin mudahnya Pelayanan Perizinan, maka dunia usaha akan bergairah dan selanjutnya berdampak pada Pendapatan Daerah dari Pajak akibat semakin banyaknya Badan Usaha yang menjadi Objek Pajak. 4. Terbangunnya Citra yang lebih baik, yang memungkinkan Pemerintah mendapatkan manfaaat dari Partisipasi Masyarakat dalam berbagai Aspek Pembangunan. 5. Mencegah sejak dini terjadinya KKN dan pungutan liar dalam proses pengurusan. Perizinan dan Non perizinan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi isu-isu strategis yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi SKPD, Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran mengambarkan hal-hal yang ingin dicapai dari suatu tujuan melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat rasional, spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Perumusan tujuan dan sasaran RENJA DPMPTSP Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran target kinerja yang tercantum dalam RENSTRA DPMPTSP periode 2021-2026

RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan tahun 2025 mencakup 6 program terdiri 13 kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   c. Administrasi BMD pada Perangkat Daerah;
   d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah;
   g. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
   b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota
3. Program Promosi Penanaman Modal
   a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal
   a. Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk sumber dana APBD Kabupaten Nunukan secara detail dapat dilihat pada Tabel “T-C.33” sebagai berikut :

TABEL. 3.2 TC.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NUNUKAN

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI KEGIATAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER (APBD KAB/APBD PROV/APBN-DAK)	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**				Rp 4.097.690.000	**APBD II**		Rp 4.059.540.000
1.1	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)**			**Rp 13.290.000**	APBD II		**Rp 13.140.000**
	Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Dokumen)	Kab. Nunukan	2 dokumen	Rp 10.000.000	APBD II	2 dok	Rp 10.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan)	Kab. Nunukan	4 laporan	Rp 3.290.000	APBD II	4 lap	Rp 3.140.000
2	**Admistrasi keuangan perangkat daerah**	**jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminstrasi keuangan**	**Kab. Nunukan**		**Rp 3.360.000.000**	APBD II		**Rp 3.392.000.000**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kab. Nunukan	4 unit	Rp 3.360.000.000	APBD II	4 unit	Rp 3.392.000.000
3	**Administrasi barang milik daerah perangkat daera**	**jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminstrasi pengelolaan BMD**	**Kab. Nunukan**		**Rp 2.400.000**	APBD II		**Rp 2.400.000**

	penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD (dokumen)	Kab.Nunukan	1 dokumen	Rp 2.400.000	APBD II	1 dok	Rp 2.400.000
4	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan adminstrasi kepegawaian**	**Kab. Nunukan**		**Rp 20.000.000**	APBD II		**Rp 20.000.000**
	peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kab.Nunukan	4 unit	Rp 5.000.000	APBD II	4 unit	Rp 5.000.000
	pengadaan paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kab.Nunukan	1 paket	Rp 15.000.000	APBD II	1 paket	Rp 15.000.000
5	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**Kab. Nunukan**		**Rp 226.000.000**	APBD II		**Rp 226.000.000**
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	Kab.Nunukan	1 paket	Rp 16.000.000	APBD II	1 paket	Rp 16.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab.Nunukan	1 paket	Rp 50.000.000	APBD II	1 paket	Rp 50.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	Kab.Nunukan	1 paket	Rp 160.000.000	APBD II	1 paket	Rp 160.000.000
6	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**jumlah unit kerjainternal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**Kab. Nunukan**		**Rp 519.945.312**	**APBD II**		**Rp 519.945.312**
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	Kab.Nunukan	12 laporan	Rp 81.346.272	APBD II	12 lap	Rp 81.346.272
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)	Kab.Nunukan	12 laporan	Rp 436.599.040	APBD II	12 laporan	Rp 436.599.040
7	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**Kab. Nunukan**		**Rp 70.000.000**	**APBD II**		**Rp 70.000.000**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	Kab.Nunukan	9 unit	Rp 70.000.000	APBD II	9 unit	Rp 70.000.000
#	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah penanaman modal/pelaku usaha**	**Kab. Nunukan**		**Rp 120.000.000**	**APBD II**	**APBD II**	**Rp 120.000.000**

1	**Penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten**	**Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (dokumen)**	**Kab. Nunukan**	**10 Dokumen**	**Rp 60.000.000**	**APBD II**	**10 Dokume**	**Rp 60.000.000**
	Fasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten	Jumlah kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kab.Nunukan	10 Dokumen	Rp 60.000.000	APBD II	50 Dokume	Rp 300.000.000
2	**Pembuatan peta potensi investasi kabupaten**	**Jumlah dokumen peta potensi investasi kabupaten (Dokumen)**	**Kab. Nunukan**	**2 Daerah**	**Rp 60.000.000**	**APBD II**	**2 Daera**	**Rp 60.000.000**
	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Kab.Nunukan	2 Daerah	Rp 60.000.000	APBD II	2 Daera	Rp 60.000.000
#	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah penanam modal (PMDN dan PMA) berskala nasional**	**Kab. Nunukan**	**26 Investor**	**Rp 6.650.000**	**APBD II**	**26 Investor**	**Rp 6.650.000**
1	**Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah pameran investasi dan potensi daerah yang diikuti**	**Kab. Nunukan**	**26 Investor**	**Rp 6.650.000**	**APBD II**	**26 Investor**	**Rp 6.650.000**
	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Kab.Nunukan	26 Investor	Rp 6.650.000	APBD II	26 Investor	Rp 6.650.000
#	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**		Kab.Nunukan		**Rp 541.308.000**	**DAK NF**		**Rp 541.308.000**
1	**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten**	**Jumlah pelaksanaan pengendalian penanaman modal**	**Kab. Nunukan**	**14 Agenda**	**Rp 541.308.000**	DAK NF	**14 Agenda**	**Rp 541.308.000**
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Kab.Nunukan	279 Pelaku Usaha	Rp 297.092.000	DAK NF	279 Pelaku Usaha	Rp 297.092.000
	Pengawasan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku. Dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha (kegiatan usaha)	Kab.Nunukan	18 Kegiatan Usaha	Rp 170.216.000	DAK NF	18 Kegiatan Usaha	Rp 170.216.000

	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kab.Nunukan	9 Kegiatan Usaha	Rp 74.000.000	DAK NF	9 Kegiatan Usaha	Rp 74.000.000
#	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**Kab. Nunukan**		**Rp 50.000.000**	**APBD II**		**Rp 60.000.000**
1	**Pengelolaan data dan informasi perizinan da non-perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten**	**Jumlah pengelolaan data perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi**	**Kab. Nunukan**		**Rp 50.000.000**	**APBD II**		**Rp 60.000.000**
	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Kab.Nunukan	70 dokumen	Rp 50.000.000	APBD II	75 dokumen	Rp 60.000.000
#	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penilaian kinerja PTSP penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha**	**Kab. Nunukan**		**Rp 375.630.000**	**APBD II**		**Rp 414.430.000**
1	**Pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten**	**Jumlah penerbitan izin usaha dan non-usaha**	**Kab. Nunukan**		**Rp 375.630.000**	**APBD II**		**Rp 414.430.000**
	Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko teritegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	Kab. Nunukan	150 Jumlah Izin	Rp 295.630.000	APBD II	150 Jumlah Izin	Rp 324.430.000
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik (pelaku usaha)	Kab. Nunukan	50 Jumlah Izin	Rp 80.000.000	APBD II	50 Jumlah Izin	Rp 90.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan RENJA dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk Tahun Anggaran 2025. Secara spesifik menjelaskan mengenai RENJA atau langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini secara detail merinci pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengintegrasikan perencanaan program, penentuan Target Kinerja, Alokasi Anggaran secara terukur dan akuntabel.

Rincian pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

TABEL. 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB. NUNUKAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP						6.493.992.464,00							6.494.707.904,85	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.493.992.464,00							6.494.707.904,85	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6.493.992.464,00							6.494.707.904,85	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah*	100 Persen			100 Persen	5.087.054.029,00						100 Persen	5.206.055.034,85	

	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berkualitas yang disusun*	-			9 Dokumen	89.431.125,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	26.778.538,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	85.466.945,00	Kab. Nunukan Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		22.637.748,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.943.610,00	Kab. Nunukan Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		4.140.790,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan*	-			1 Unit	3.474.100.015,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	3.786.769.016,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang /bulan	3.474.100.015,00	Kab. Nunukan Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		3.786.769.016,40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Pemgelolaan Barang Milik Daerah*	-			1 Unit	1.672.990,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	1.756.639,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1.672.990,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		1.756.639,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian*	-			4 Unit Kerja	92.050.000,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	128.520.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	92.050.000,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		128.520.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum*	-			1 Unit Kerja	645.977.455,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	439.408.709,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	186.179.200,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		173.431.860,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.732.255,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		84.960.419,25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	166.396.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		181.016.430,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	213.670.000,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang*	-			1 Unit Kerja	700.645.104,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	737.822.131,20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145.800.000,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		167.265.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	554.845.104,00	Kab. Nunukan , Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		570.557.131,20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah*	-			1 Unit Kerja	77.666.520,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	77.666.520,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Mansapa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Persentase Peningkatan Jumlah Penanam Modal / Pelaku Usaha***	**30 Persen**			**30 Persen**	**338.502.360,00**						**30 Persen**	**164.613.940,00**	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Terlaksananya Kajian Pengembangan Investasi*	-			30 Dokumen	338.502.360,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	108.755.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal															
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota															

			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				30 Dokumen	228.232.850,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		108.755.530,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten*	-			2 Dokumen	110.269.510,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	55.858.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				2 Daerah	110.269.510,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		55.858.410,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Penanam Modal (PMDN dan PMA) Berskala Nasional***	**30 Investor**			**30 Investor**	**217.988.925,00**						**30 Investor**	**224.038.930,00**	

	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pameran Investasi dan Potensi Daerah yang Diikuti*	-			1 Kegiatan	217.988.925,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	224.038.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	217.988.925,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		224.038.930,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Penilaian Kinerja PTSP***	**Sangat Baik Indeks Sangat Baik**			**Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks**	**537.786.010,00**						**Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks**	**560.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Usaha dan Non Usaha*	-			200 Jumlah Izin	537.786.010,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	560.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													

			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	210.310.340,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	147.329.765,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				185 Kegiatan Usaha	180.145.905,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Tingkat Kepatuhan Penanam Modal terhadap Ketentuan Perizinan Berusaha***	**Sangat Baik Nilai**			**Sangat Baik Nilai**	**262.661.340,00**						**Sangat Baik Nilai**	**280.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal*	-			14 Agenda	262.661.340,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				9 Kegiatan Usaha.	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				280 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				200 Kegiatan Usaha	262.661.340,00	Kab. Nunukan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase ketersediaan data dan informasi Penanam Modal/Pelaku Usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**49.999.800,00**						**100 Persen**	**60.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Data Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi*	-			65 Dokumen	49.999.800,00			-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				26 Dokumen	49.999.800,00	Kab. Nunukan, Nunukan Selatan, Nunukan Selatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik Melalui Agenda Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	J U M L A H							**5.968.063.734,00**							**6.494.707.904,85**	

BAB V
PENUTUP

Dengan telah tersusunnya RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk Tahun 2025 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Nunukan pada Tahun 2025 setelah adanya anggaran kegiatan. Karena Renja DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA juga berfungsi untuk melihat kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah ditahun sebelumnya.

RENJA DPMPTSP sangat terkait dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja DPMPTSP Kabupaten Nunukan disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang dan Renstra DPMPTSP yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nunukan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/ sosialisasi RENJA kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan RENSTRA yang telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan implementasi RENJA dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam RENJA yang dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholder* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari RENJA yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi RENJA ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan RENJA yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa berupa penyesuaian terhadap RENJA untuk pencapaian Visi dan Misi Organisasi;
5. Untuk menjamin konsistensi, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat dilingkungan DPMPTSP Kabupaten Nunukan wajib melakukan

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas;

6. Secara proaktif, Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga DPMPTSP Kabupaten Nunukan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi RENJA setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasinya kepada Kepala Dinas;
7. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas;
8. RENJA DPMPTSP Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Semoga RENJA ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir yaitu Peningkatan Nilai Investasi dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan melalui Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menjadikan Kabupaten Nunukan Tujuan Investasi dengan Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah dan Transparan.

Nunukan, 31 Agustus 2024
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN NUNUKAN

JUNI MARDIANSYAH, A.P
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001